

**Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus di Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Tidore Kepulauan**

**Sitna Jainuddin, Gaffar, Mattoasi**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo  
Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo 96128, Telp 085394070609,  
sitnajainudin01@gmail.com , gaffar@ung.ac.id , mattoasi@ung.ac.id

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the influence of transparency, accountability, and internal control system on the financial performance of regional government. This study uses a quantitative and total sampling technique for data collection. The data analysis technique is descriptive quantitative analysis, utilizing t statistics, f statistics, and the coefficient of determination (adjusted R Square) though IBM SPSS 20 for windows. The result shoe that transparency positively and significantly influences the regional government's financial performance. Similarly, accountability also positively and significantly influences the regional government's financial performance. Furthermore, internal control systems positively and significantly influence the regional government's financial performance as well. Simultaneously, transparency, accountability, and internal control system positively and significantly influence the regional government's financial performance, with a determinant value of 60,7%, while the remaining 30,3% is due to other factors that are not examined in thid study.*

**Keywords:** *transparency, accountability, internal control systems financial performance.*

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan *sampling jenuh*. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif deskriptif dengan menggunakan uji t statistic, uji f statistic, dan uji koefisien determinasi (*adjusted R Square*) dengan menggunakan IBM SPSS 20 *for windows*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, serta sistem pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah serta secara simultan transparansi, dan akuntabilitas serta sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan nilai determinan sebesar 60.7% sedangkan sisanya 30.3% disebabkan oleh faktor-faktor lain yang ada dalam struktur teori namun tidak diuji dalam penelitian ini.

**Kata Kunci:** *Transparansi, Akuntabilitas, system pengendalian internal, kinerja keuangan*

## PENDAHULUAN

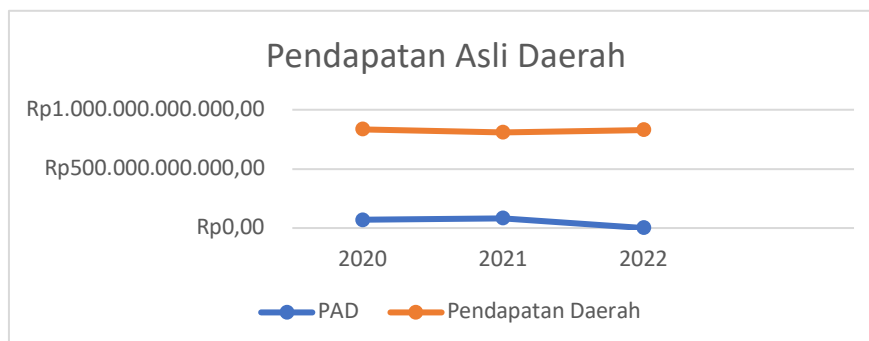
Masalah perkembangan organisasi sektor publik yang semakin pesat menuntut pemerintah agar melakukan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pemberian otonomi dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Kabupaten/Kota membawa konsekuensi perubahan pada pola dan sistem pengawasan yang mendasar dengan diberinya keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Keadaan ini sesuai dengan teori *stewardship* yang dimana menurut Donalson dan Davis (1997) mengatakan bahwa teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidak lagi termotivasi oleh tujuan-tujuan individu akan tetapi lebih mengarah pada sasaran hasil utama mereka yang digunakan untuk kepentingan organisasi.

Dalam teori tersebut yang paling diutamakan adalah kinerja. Kinerja pemerintah dikatakan baik dapat dilihat dari tingkat pencapaian hasil yang dilaksanakan secara nyata dan maksimal (Syahdika, 2021). Kinerja suatu organisasi yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian hasil tertentu, harus sesuai dengan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas yang harus dipertanggungjawabkan (Mohamad, 2016). Untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program berhasil atau tidaknya diperlukan pengukuran kinerja sebagai alat ukur.

Menurut Sumarjo (2010) menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan beberapa pendapat terkait definisi kinerja keuangan yang telah dikemukakan dapat di simpulkan bahwa kinerja keuangan suatu pemerintah daerah mengacu pada tingkat pencapaian hasil operasional dibidang keuangan daerah, termasuk pendapatan dan belanja daerah berdasarkan indikator keuangan yang ditetapkan oleh kebijakan dan ketentuan peraturan perundang undangan selama periode anggaran.

Kinerja keuangan pemerintah dapat diukur dari seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki daerahnya sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahunnya. Berikut di sajikan mengenai pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022.

**Gambar 1. Grafik pendapatan Asli Daerah dan Total P Grafik pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan daerah Kota Tidore Kepulauan 2020-2022**



Sumber: data BPKAD Kota Tidore Kepulauan

Berdasarkan Gambar grafik 1 diperoleh informasi bahwa kontribusi pendapatan asli daerah sebagai bukti kinerja dalam pembangunan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 masih rendah dengan kisaran 8 persen untuk Tahun 2020. Demikian juga Tahun 2021 hanya mencapai 9 persen dan pada tahun 2022 lebih menurun drastis hanya mencapai 7 persen terhadap total pendapatan daerah.

Berkaitan dengan fenomena yang telah dikemukakan, beberapa variabel yang di duga dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurut penelitian Bambang Jatmiko (2020) menyatakan bahwa variabel yang digunakan dalam kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu Pengawasan Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi. Namun Menurut Rahayu, Hendaris (2022) menyatakan bahwa variabel yang digunakan dalam kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu penerapan good government governance dan pengawasan internal. Menurut Galih Supraja (2019) menyatakan bahwa variabel yang digunakan dalam kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan efektivitas fungsi pengawasan. Sehingga dalam penelitian ini disimpulkan bahwa variabel yang cocok digunakan yaitu transparansi, akuntabilitas dan sistem pengendalian internal.

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh Karim *et al.* (2019) variabel akuntabilitas, transparansi dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pada Pendapatan Daerah Kota Gorontalo. Demikian juga dalam penelitian yang di lakukan oleh Bambang jatmiko (2020) mengatakan bahwa Pengawasan Internal, Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah kab. Sleman. Namun hasil yang berbeda yang di lakukan pada penelitian Jitmau *et al.* (2020) akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan transparansi dan pengendalian internal intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Menurut Dwiyanto dalam (Syahdika, 2021) menyatakan bahwa transparansi adalah sebagai wadah penyediaan informasi tentang pemeritahan bagi

publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai.

Penelitian yang di lakukan oleh Ulya *et al.* (2018) transparansi dan akuntabilitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, kemudian transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kinerja pemerintah daerah. Akuntabilitas menurut Syahrudin Rasul (2002:8) akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas. Dan Menurut Krismiaji dalam (Mapossa, 2018) Pengendalian (*control*) adalah proses mempengaruhi atau mengarahkan aktivitas sebuah obyek, organisasi atau sistem.

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu di atas, penulis tertarik untuk membuktikan apakah ada atau tidaknya pengaruh dari variabel-variabel tersebut pada penelitian ini. Berhubung juga variabel-variabel tersebut masih ada hasil yang belum konsisten pada penelitian sebelumnya. Hal inilah yang membuat penulis ingin menggali lebih dalam lagi. Berdasarkan fenomena dan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian penelitian dengan formulasi judul “ Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara kuantitatif. Dengan menggunakan analisis data yaitu analisis statistic deskriptif dan hipotesis statistika diantaranya dengan menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan uji hipotesis penelitian. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan kuesioner yang dimana sampel dalam penelitian ini yaitu 50 responden Pegawai BPKAD Kota Tidore kepulauan dengan menggunakan *sampling* jenuh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **Hasil Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid tidaknya butir butir kuesioner yang akan disebar kepada responden. Adapun dalam penelitian ini,peneliti menggunakan metode *pearson's product moment correlation*. Suatu data dapat dikatakan valid jika R hitung lebih besar daripada R tabel. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 50 responden. Dari jumlah responden tersebut, dapat di ketahui besarnya R table adalah 0,279 dengan taraf kesalahan sebesar 5% jadi, data yang dikatakan valid ketika nilai R hitung pada Corrected item Total Correlation lebih besar dari R table 0,279.

**Tabel 1. Hasil Uji Validitas**

Variabel	Kode Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Y1	0,470	0,279	Valid
	Y2	0,724	0,279	Valid
	Y3	0,739	0,279	Valid
	Y4	0,567	0,279	Valid
	Y5	0,376	0,279	Valid
	Y6	0,282	0,279	Valid
	Y7	0,571	0,279	Valid
	Y8	0,608	0,279	Valid
	Y9	0,471	0,279	Valid
	Y10	0,678	0,279	Valid
	Y11	0,706	0,279	Valid
Transparansi (X1)	X1.1	0,593	0,279	Valid
	X1.2	0,831	0,279	Valid
	X1.3	0,679	0,279	Valid
	X1.4	0,444	0,279	Valid
	X1.5	0,292	0,279	Valid
	X1.6	0,798	0,279	Valid
	X1.7	0,814	0,279	Valid
Akuntabilitas (X2)	X2.1	0,358	0,279	Valid
	X2.2	0,500	0,279	Valid
	X2.3	0,592	0,279	Valid
	X2.4	0,679	0,279	Valid
	X2.5	0,582	0,279	Valid
	X2.6	0,450	0,279	Valid
	X2.7	0,523	0,279	Valid
	X2.8	0,405	0,279	Valid
Sistem Pengendalian Internal (X3)	X3.1	0,566	0,279	Valid
	X3.2	0,327	0,279	Valid
	X3.3	0,340	0,279	Valid
	X3.4	0,531	0,279	Valid
	X3.5	0,545	0,279	Valid
	X3.6	0,335	0,279	Valid
	X3.7	0,861	0,279	Valid
	X3.8	0,629	0,279	Valid
	X3.9	0,422	0,279	Valid
	X3.10	0,842	0,279	Valid
	X3.11	0,419	0,279	Valid

Sumber: data diolah 2024, SPSS Versi 20

Berdasarkan hasil pengujian validitas pada tabel 1, dapat diketahui bahwa variable Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), Sistem Pengendalian Internal (X3), dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) diperoleh R hitung lebih besar bila dibandingkan dengan nilai R table 0,279. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa instrument penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2) , Sistem Pengendalian Internal (X3). Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dapat dikatakan valid.

## 2. Uji Realibitas

Uji reabilitas adalah suatu uji yang digunakan untuk mengetahui reliable atau tidaknya suatu instrument penelitian. Variabel reliable jika nilai Alpha > 0,60

Berikut ini hasil uji reabilitas dari masing masing variabel:

**Tabel 2. Hasil Uji Reabilitas**

Variabel	R H itung	Nilai Cronbach's Alpha	Keterangan
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0,761	0,60	Reliabel
Transparansi (X1)	0,554	0,60	Reliabel
Akuntabilitas (X2)	0,820	0,60	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal (X3)	0,792	0,60	Reliabel

Sumber: Data diolah 2024, SPSS Versi 20

Berdasarkan hasil pengujian reabilitas pada tabel 2 dapat diketahui bahwa variabel Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), Sistem Pengendalian Internal (X3), dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) diperoleh nilai reabilitas lebih besar bila dibandingkan nilai *cronbach's alpha* 0,60. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa instrument penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), Sistem Pengendalian Internal (X3), dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dapat dikatakan reliable atau handal.

## 1. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan untuk mengetahui bahwa distribusi penelitian tidak menyimpang secara signifikan dari distribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan Kolmogorov Smirnov tes dalam aplikasi SPSS. Uji normalitas Kolmogorov smirnov merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Berikut ini hasil uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov smirnov:

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7

	Std. Deviation	2,12952145
	Absolute	0,147
Most Extreme Differences	Positive	0,128
	Negative	-0,147
Kolmogorov-Smirnov Z		1,038
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,232

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Sumber: Data diolah 2024,SPSS Versi 20

Berdasarkan hasil output yang tertera pada pengolahan data uji normalitas dengan menggunakan rumus *Kolmogorov Smirnov Test* sebagaimana tertera pada Tabel 3, maka diperoleh nilai Exact.sig.(2 tailed) untuk variabel Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), Sistem Pengendalian Internal (X3), dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) adalah 0,232 lebih besar dari 0,05 ( $0,232 > 0,05$ ) sehingga data dapat dikatakan berdistribusi normal.

## 2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan bentuk pengujian yang menyatakan bahwa independen variabel harus terbebas dari gejala multikolinieritas. Dalam penelitian ini, penelitian melakukan uji multikolinieritas dengan cara membandingkan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dengan angka 10. Jika nilai VIF  $< 10$  atau memiliki Tolerance  $> 0,1$ , maka dikatakan tidak terdapat masalah multikolinieritas. Berikut ini hasil uji multikolinieritas melalui nilai VIF :

**Tabel 4. Nilai VIF Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1		
Transparansi (X1)	0,585	1,711
Akuntabilitas (X2)	0,568	1,759
Sistem Pengendalian Interna (Y)	0,393	2,548

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber: Data diolah 2024,SPSS Versi 20

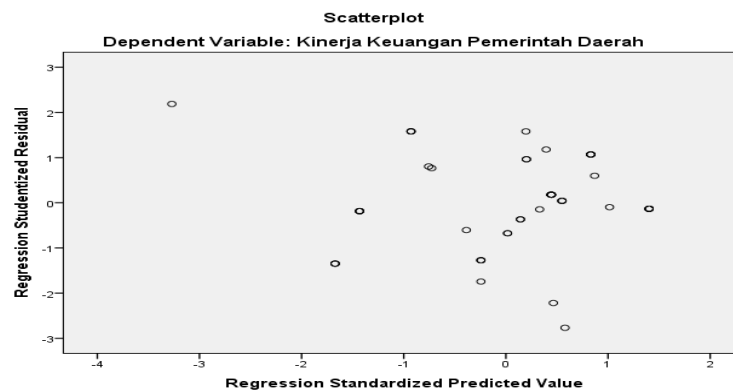
Dari hasil analisis pada table 4, dapat dilihat bahwa Nilai Tolerance untuk variabel transparansi (X1) yaitu  $0,585 > 0,1$  serta nilai VIF  $1,711 < 10,00$ . Selanjutnya untuk variabel akuntabilitas (X2) memperoleh Nilai Tolerance sebesar  $0,568 > 0,1$  serta nilai VIF  $1,759 < 10,00$ . Kemudian yang terakhir untuk variabel Sistem Pengendalian Internal (X3) memperoleh Nilai Tolerance sebesar  $0,393 > 0,1$  serta

nilai VIF 2,548 < 10,00. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas pada masing-masing Independen.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini dimaksudkan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model regresi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji scatterplot untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas. Tidak terdapat heteroskedastisitas jika titik-titik menyebar secara merata diatas maupun dibawah angka nol. Berikut ini hasil uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan uji scatterplot:

**Gambar 2. Hasil Uji Scatterplot**



Dari hasil analisis pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa seluruh titik-titik menyebar diatas maupun dibawah angka nol dan penyebaran titik-titik data tidak berpola sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

### Uji T (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh secara atau secara individu antara Perencanaan (X1), Pengawasan (X2), dan Akuntabilitas (X3) terhadap Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Y). cara melakukan uji adalah dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 (α = 5%) (Ghozali, 2011) ketentuan penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: (a) jika nilai signifikansi  $t > 0,05$  maka H0 diterima dan H1 ditolak. Hasil pengujiannya sebagai berikut:

**Tabel 5. Hasil Uji T Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,225	6,588		0,186	,853
<sup>1</sup> Transparansi	0,701	0,172	0,477	4,066	,000
Akuntabilitas	0,432	0,217	0,237	3,991	,019

Sistem Pengendalian Internal	0,187	0,118	0,226	3,998	,022
------------------------------	-------	-------	-------	-------	------

Sumber: Data diolah 2024, SPSS Versi 20

Persamaan regresi di atas memiliki makna sebagai berikut :

- 1) Hasil analisis uji t untuk variabel transparansi (X1) diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $4,066 > t_{tabel} 2,012$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa transpaansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan .
- 2) Hasil analisis uji t untuk variabel akuntabilitas (X2) diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $3,991 > t_{tabel} 2,012$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,019 < 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
- 3) Hasil analisis uji t untuk variabel sistem pengendalian internal (X3) diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $3,998 > t_{tabel} 2,012$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,022 < 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan.

### Uji F (Uji Simultan)

Uji ini digunakan untuk mengetahui secara keseluruhan dalam penelitian ini. Uji f (uji simultan) digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan atau bersama-sama variabel Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), dan Sistem Pengendalian Internal (X3) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Kriteria pengujian simultan yaitu jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka tidak ada pengaruh secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka ada pengaruh secara simultan antara variabel independen dengan variabel dependen. Hasil pengujiannya sebagai berikut :

**Tabel 6. Hasil Uji F ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	379,572	3	126,524	26,192	,000 <sup>b</sup>
Residual	222,208	46	4,831		
Total	601,780	49			

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

b. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal, Transparansi, Akuntabilitas

Sumber: Data diolah 2024, SPSS Versi 20

Dari Tabel 6 menunjukkan hasil uji F diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 26,192 >  $F_{tabel}$  sebesar 2,81 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 sehingga lebih < 0.05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa transparansi (X1), akuntabilitas (X2), dan sistem pengendalian internal (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan.

### R Square (Koefisien Determinasi)

Analisis koefisien determinasi (R Square) digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil analisis koefisien determinasi.

**Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R Square)  
Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,794 <sup>a</sup>	,631	,607	2,19787

- a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal, Transparansi, Akuntabilitas
- b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber : Data diolah 2023, SPSS Versi 20

Pada tabel 7 menunjukkan nilai R square sebesar 0,607 atau 60.7% hal ini menunjukkan bahwa variabel kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel transparansi, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal sebesar 60.7% sedangkan sisanya 30.3% disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

### Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diolah dengan menggunakan SPSS Versi 20 maka diperoleh beberapa kesimpulan penelitian.

### Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan

Dari hasil perhitungan uji hipotesis (Uji t) dapat disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Dengan demikian Hipotesis pertama yaitu “transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah” diterima. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulya, Astuti (2018), Fanny Jitmau, Lintje Kalangi, dan Linda Lambey (2020), Elkha, F., & Wahidawati (2020) dan Lucy Auditya, Lismawati (2020) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga dapat diketahui bahwa

semakin baik transparansi yang diterapkan oleh pemerintah, maka kinerja pemerintah semakin meningkat.

Transparansi dapat berpengaruh karena Keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik sehingga menciptakan pemerintah yang bersih dan akuntabel. Informasi yang diberikan secara memadai dan mudah dipahami digunakan sebagai alat untuk memonitoring dan mengevaluasi hasil kinerja dalam organisasi. Sehingga masyarakat merasa bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah sudah sangat baik. Kemudian hasil penelitian ini dimana pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja keuangan memiliki pengaruh sebesar 0,701 atau 70,1%. Sehingga hasil penelitian ini memiliki pengaruh dengan kategori kuat berdasarkan skala pengukuran (Guilford, 1956:145).

Hasil penelitian ini mendukung *stewardship theory* bahwa transparansi kinerja keuangan pemerintah menjadi penting karena melibatkan hak publik untuk mengetahui bagaimana sumber daya publik dikelola dan bagaimana kinerja keuangan pemerintah dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks teori *stewardship*, ini mencerminkan upaya BPKAD untuk bertindak sebagai pengelola sumber daya public yang berorientasi pada tujuan dan keterbukaan, sehingga public dapat memahami bagaimana sumber daya tersebut dikelola. Dari hasil penelitian, penelitian terdahulu, dan dukungan teori dapat dipahami bahwa transparansi sangat penting peranannya dalam meningkatkan kinerja keuangan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tidore Kepulauan.

### **Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Tidore Kepulauan**

Dari hasil perhitungan uji hipotesis (Uji t) dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Dengan demikian Hipotesis kedua yaitu “akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah” diterima. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusdi Abdul Karim, dan Mursalim (2019) dan Ulya, dan Astuti (2018), Lucy Auditya, Lismawati (2020) dan Jatmiko (2020) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga dapat diketahui bahwa semakin baik bentuk pertanggungjawaban pemerintah BPKAD Kota Tidore Kepulauan maka kinerja pemerintah akan semakin meningkat.

Akuntabilitas dapat berpengaruh karena akuntabilitas publik telah melaksanakan kegiatan anggaran dengan baik, memprogram anggaran, melaksanakan program anggaran, mengalokasikan dana anggaran sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas dalam pemerintah juga bertanggungjawab terhadap peningkatan anggaran melalui kinerja kepada masyarakat luas. Hal ini dapat dibuktikan dengan jawaban responden melalui kuisioner yang dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas sangat baik. Kemudian hasil penelitian ini dimana pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja keuangan memiliki pengaruh sebesar 0,432 atau 43,2%. Sehingga hasil penelitian ini memiliki pengaruh dengan kategori sedang berdasarkan skala pengukuran (Guilford, 1956:145).

Hasil penelitian ini mendukung stewardship teory bahwa terdapat hubungan antara organisasi pemerintah dengan tujuan yang akan dicapai yaitu mensejahterakan masyarakat. Dalam konteks teory stewardship hal ini mengarah pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah karena mereka harus menjelaskan dan membuktikan bahwa tindakan dan keputusan mereka didasarkan pada pertimbangan yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Dari hasil penelitian, penelitian terdahulu, dan dukungan teori dapat dipahami bahwa akuntabilitas sangat penting peranannya dalam meningkatkan kinerja keuangan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tidore Kepulauan.

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan**

Dari hasil perhitungan uji hipotesis (Uji t) dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Dengan demikian Hipotesis ketiga yaitu “sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah” diterima. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lucy Auditya, Lismawati (2020) dan Karim, R. Abdul, & Mursalim (2019), Elkha, F., & Wahidawati (2020), Syahdika (2021) yang menyatakan bahwa system pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika pemerintah daerah melakukan pengendalian internal dengan baik maka kinerja pemerintah daerah akan semakin meningkat dan membaik, sehingga dalam melakukan kegiatan pemerintah daerah telah berjalan sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Pengendalian internal itu sendiri untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan. Artinya pengendalian internal dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja individu dalam pemerintah daerah tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan jawaban responden melalui kuisioner yang dapat disimpulkan bahwa penerapan pengendalian internal sangat baik. Sebab dengan adanya sistem yang tersedia dapat diterapkan sesuai fungsi untuk membantu pemerintah daerah dalam hal memberikan jaminan yang memadai bahwa laporan keuangan pemerintah telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Hasil penelitian ini didukung dengan teori stewardship yang terdapat eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. SPIP dilakukan agar penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien sehingga dapat tercipta laporan keuangan yang berkualitas. Dari hasil penelitian, penelitian terdahulu, dan dukungan teori dapat dipahami bahwa sistem

pengendalian internal sangat penting peranannya dalam meningkatkan kinerja keuangan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tidore Kepulauan.

### **Pengaruh Transparansi, akuntabilitas dan system pengendalian internal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan**

Dari hasil perhitungan uji hipotesis (Uji f) dapat disimpulkan bahwa transparansi (X1), akuntabilitas (X2), dan sistem pengendalian internal (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan. dengan demikian Hipotesis keempat yaitu “transparansi, akuntabilitas dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah” diterima. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggi vanesya putri syahdika (2021), Lucy Auditya, Husaini Lismawati (2020) dan Rusdi Abdul Karim, dan Mursalim (2019) yang menyatakan bahwa transparansi, akuntabilitas dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal jika dilakukan secara bersama-sama maka akan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Sebagaimana tujuannya untuk mencegah duplikasi usaha yang tidak perlu atau pemborosan dalam segala kegiatan. Begitu juga melakukan transparansi dimana suatu prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai serta pertanggungjawaban lembaga publik harus berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku didalam penggunaan sumber dana publik, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi sehingga apabila dilakukan secara keseluruhan akan menghasilkan suatu kinerja yang dibutuhkan di pemerintah. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Elkha, dan Wahihwati (2020) dan Lucy Auditya, Husaini Lismawati (2020).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hasil penelitian hipotesis pertama menunjukkan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kota Tidore Kepulauan, kemudian Hasil penelitian hipotesis kedua menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kota Tidore Kepulauan, Serta Hasil penelitian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kota Tidore Kepulauan, dan Hasil penelitian hipotesis keempat menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan sebesar 60,7% dan sisanya

30,3% terdapat pengaruh variabel lain yang ada dalam struktur teori namun tidak disertakan dalam penelitian ini.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: transparansi sebaiknya lebih ditingkatkan lagi dalam pengelolaan keuangan agar Kinerja Keuangan pada BPKAD Kota Tidore Kepulauan lebih meningkat, Akuntabilitas sebaiknya di tingkatkan lagi karena dengan adanya akuntabilitas maka dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi, Sistem pengendalian internal sebaiknya lebih ditingkatkan lagi karena dengan adanya system pengendalian internal maka dapat membantu manajemen dalam mengendalikan sebuah organisasi bisnis, dan Kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil uji determinasi dalam penelitian ini, variabel transparansi, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal mampu menjelaskan tentang kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 60.7% sedangkan sisanya 30.3% dapat di jelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. Maka kepada peneliti selanjutnya yang mengambil topic yang serupa dengan penelitian ini disarankan agar dapat menguji variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kota Tidore Kepulauan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Damayanti, E. (2018). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 32-42.
- Donalson, L., & Davis, J. H. (1997). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance dan Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16, 49-64.
- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2016). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah* (Vol. 1).
- Elkha, F., & Wahidawati. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1-19.
- Jatmiko, B., Akuntansi, P. S., & Yogyakarta, M. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. (September), 231-246.
- Karim, R. A., & Mursalim. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Keuangan. 2.

- Lismawati, Husaini, & Auditya, L. (2013). Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness*, 3(1), 21-41.
- Mapossa, J. B. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Pada Badan Pengelolaan Luwu. *New England Journal of Medicine*, 372(2).
- Nauw, R. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- Rahayu, H. (2022). Pengaruh Penerapan Good Government Governance dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kab. Bandung Barat).
- Rasul, S. (2002). *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran: Jakarta Detail Rekod*.
- Setiawan, H. E., & Safri, M. (2016). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bungo. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 4(1), 51-72.
- Supraja, G. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- Syahdika, A. V. P. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor).